

Penerapan Sila-5 Pancasila: Solusi Kesejahteraan di Masyarakat Terpencil

Dhitan Hakim Arendrayuda ¹⁾, Gede Bagus Narindra Utama ²⁾, Mario Delvino Edward Siba³⁾, M. Asif Nur Fauzi⁴⁾

¹⁾ Telkom University Kampus Surabaya

²⁾ Telkom University Kampus Surabaya

³⁾ Telkom University Kampus Surabaya

⁴⁾ STEBI Syaikhona Kholil Sidogiri, Pasuruan

¹⁾ dhitanhakima@student.telkomuniversity.ac.id

²⁾ gedebagusu@student.telkomuniversity.ac.id

³⁾ mariodelvinoedward@student.telkomuniversity.ac.id

⁴⁾ asif.elek@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan nilai-nilai sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil, khususnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sebagai wilayah perbatasan, Nunukan menghadapi berbagai permasalahan sosial-ekonomi seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas pendidikan, dan minimnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur terkait pembangunan daerah terpencil, keadilan sosial, serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan sila kelima di Kabupaten Nunukan masih bersifat prosedural dan belum menyentuh aspek substantif keadilan sosial. Program pembangunan cenderung berorientasi pada proyek fisik dan belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan paradigma pembangunan baru yang berpusat pada manusia (*people-centered development*), dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat perbatasan.

Kata kunci : Pancasila, sila kelima, keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, Nunukan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki makna luhur yang telah menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," dan dilambangkan dengan Padi dan Kapas yang Dimana mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesejahteraan yang merata. Namun, realitanya menunjukkan bahwa kesenjangan sosial ekonomi masih menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius, terutama di daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia.

Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil seringkali menghadapi masalah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal utama yang membuat tingkat kesejahteraan mereka rendah

adalah karena akses yang sangat terbatas terhadap berbagai fasilitas penting. Misalnya, infrastruktur seperti jalan raya yang bagus, listrik yang stabil, atau air bersih yang mudah didapat sering kali sulit dijangkau. Menurut Jeffrey Sachs (2012) kurangnya infrastruktur yang memadai dapat menciptakan lingkaran setan kemiskinan, di mana masyarakat sulit untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi dalam ekonomi modern. Selain itu, pendidikan juga menjadi tantangan karena sekolah yang layak. Kesehatan pun demikian; rumah sakit atau puskesmas yang dekat dan lengkap jarang ada, membuat orang sakit harus melakukan perjalanan panjang untuk mendapatkan pengobatan.

Kabupaten Nunukan, sebagai bagian dari wilayah perbatasan Kalimantan Utara, merupakan salah satu contoh nyata daerah terpencil yang menghadapi berbagai permasalahan kompleks terkait kesejahteraan masyarakat. Letak geografis yang sulit dijangkau, minimnya infrastruktur dasar, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan sila ke-5 Pancasila sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil, khususnya di Kabupaten Nunukan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi upaya pembangunan nasional yang inklusif, sehingga masyarakat di daerah terpencil tidak lagi terpinggirkan dan dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara adil.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini akan difokuskan pada wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pemilihan wilayah ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa kedua kabupaten tersebut merupakan salah satu daerah terpencil yang masih memiliki permasalahan kompleks terkait kesejahteraan masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi masyarakat Kabupaten Nunukan, terkait akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan?
2. Bagaimana penerapan sila ke-5 Pancasila dalam menjalankan program pembangunan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi di daerah Nunukan?

3. Bagaimana strategi dan rekomendasi berbasis nilai-nilai Pancasila, Sila ke-5 yang dapat diterapkan untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata di daerah Nunukan?

1.4 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai Adalah :

1. Melihat kondisi kesejahteraan masyarakat di Nunukan, terutama pada bagian fasilitas seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit.
2. Mencari tahu seberapa jauh nilai-nilai sila ke-5 Pancasila sudah diterapkan dalam aturan pemerintah dan program pembangunan di daerah Nunukan.
3. Mencari tahu apa saja masalah dan kesulitan yang dihadapi saat mau menerapkan sila ke-5 Pancasila di daerah Nunukan.
4. Membuat strategi yang bisa dipakai, berdasarkan nilai-nilai Sila ke-5 Pancasila, supaya keadilan sosial bisa terwujud s bagi masyarakat di daerah Nunukan.

1.5 Manfaat

Berikut ini manfaat yang diharapkan :

1. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan di Kabupaten Nunukan, seperti peningkatan infrastruktur dan akses layanan dasar.
2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat lokal dalam mewujudkan keadilan sosial.
3. Memperkaya kajian tentang Pancasila, khususnya sila ke-5, dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial di daerah terpencil seperti daerah Nunukan.

1.6 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka. Salah satu Pustaka diperoleh dari jurnal yang berjudul “Analisis ketersediaan infrastruktur pada Kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia(kasus Kabupaten Nunukan).”

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sila Ke-5 Pancasila

Sila ke-5 Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," artinya semua warga negara punya hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan dan diperlakukan dengan adil dalam setiap hal. Menurut Kartohadiprodjo Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia dalam arti pandangan dunia. Nilai keadilan mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Keadilan sosial itu meliputi:

- a. Hukum harus ditegakkan dengan adil, tanpa membedakan orang.
- b. Setiap keputusan penting harus diambil dengan cara yang adil, terbuka, dan melibatkan masyarakat.
- c. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan

Sila ke-5 ini mewajibkan negara untuk melindungi dan membantu masyarakat yang lemah, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, supaya mereka bisa hidup sejahtera seperti warga negara lainnya.

2.2 Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Kusumawardhani (2014), kesejahteraan adalah rasa nyaman masyarakat karena terpenuhinya keinginan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kesejahteraan ekonomi sosial seperti kesejahteraan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kesejahteraan batin, itu yang bersifat emosional, intelektual, dan spiritual masyarakat. Kesejahteraan masyarakat sendiri merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), pendidikan, kesehatan, serta adanya kesempatan untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kesejahteraan masyarakat bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan psikologis.

Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak

dan mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat.

2.3 Daerah Terpencil dan Permasalahan Kesejahteraan

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi. Maclver dan Page dalam Soerjono Soekanto 2006: 22, memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.

Menurut petunjuk teknis penyaluran tunjangan khusus jenjang pendidikan dasar Kemendikbud tahun 2015 mengungkapkan bahwa daerah yang terpencil atau terbelakang adalah daerah dengan faktor geografis yang relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan, pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil, seperti daerah yang memiliki pemukiman permanen dan terpencil yang penduduknya kurang dari 1000 jiwa dan yang tidak bisa dihubungkan dengan kelompok yang lain dalam jarak tempuh tertentu yang tidak dapat dicapai dengan jalan kaki ataupun tidak memiliki akses transportasi yang memadai dan daerah dengan faktor geomorfologis lainnya yang sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi, serta tidak memiliki sumber daya alam.

Daerah terpencil adalah wilayah yang memiliki karakteristik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang khas, serta menghadapi berbagai permasalahan kompleks terkait kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri daerah terpencil antara lain:

- a. Memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar.
- b. Aksesibilitas yang rendah (sulit dijangkau).
- c. Infrastruktur yang minim (jalan, listrik, air bersih).
- d. Kualitas sumber daya manusia yang rendah (pendidikan, kesehatan).
- e. Tingkat kemiskinan yang tinggi.
- f. Keterbatasan akses terhadap pelayanan publik.

Permasalahan kesejahteraan di daerah terpencil merupakan tantangan serius bagi pembangunan nasional. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dan intervensi yang tepat sasaran untuk mengatasi permasalahan tersebut.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka. Salah satu Pustaka diperoleh dari jurnal yang berjudul “Analisis ketersediaan infrastruktur pada Kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia(kasus Kabupaten Nunukan).”

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan, sebagai wilayah perbatasan, memiliki karakteristik geografis yang unik dan permasalahan kompleks terkait kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat Nunukan.

3.1.1. Infrastruktur

Kondisi infrastruktur dasar di Kabupaten Nunukan lebih dari sekadar "memprihatinkan"; ia adalah akar dari keterisolasian ekonomi dan sosial. Pernyataan dalam laporan resmi bahwa panjang jalan telah memenuhi standar menjadi ironis ketika kualitasnya masih didominasi oleh perkerasan tanah dan agregat. Ini bukan sekadar masalah kenyamanan, melainkan fondasi yang menentukan apakah sebuah komunitas dapat berpartisipasi dalam ekonomi modern atau terperangkap dalam subsistensi. Seperti yang dijelaskan oleh Jeffrey Sachs (2012), kurangnya infrastruktur yang memadai dapat menciptakan "lingkaran setan kemiskinan," di mana isolasi geografis secara langsung menghambat produktivitas dan akses pasar.

- Jalan: Sebagian besar wilayah Nunukan sulit dijangkau karena kondisi jalan yang rusak dan tidak memadai. Hal ini menyebabkan biaya transportasi menjadi mahal dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

- Listrik: Ketersediaan listrik masih terbatas, terutama di wilayah pedalaman. Banyak desa yang belum teraliri listrik atau hanya mendapatkan pasokan listrik selama beberapa jam saja dalam sehari.
- Air Bersih: Akses terhadap air bersih juga menjadi permasalahan serius. Masyarakat Nunukan masih mengandalkan sumber air yang tidak terjamin kebersihannya, seperti sungai dan sumur tradisional.

Kondisi ini diperparah oleh krisis energi dan air bersih. Ketersediaan listrik yang baru mencapai 54,6% dari standar dan akses air bersih PDAM yang hanya dinikmati oleh segelintir kecamatan bukanlah sekadar angka statistik. Ini adalah realitas sehari-hari yang melumpuhkan potensi industri kecil, menghambat proses belajar anak di malam hari, dan meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Kegagalan dalam menyediakan pilar-pilar dasar ini menunjukkan adanya pembangunan yang lebih fokus pada proyek-proyek yang terlihat, ketimbang investasi jangka panjang pada kualitas hidup warga.

3.1.2. Pendidikan

Sektor pendidikan di Nunukan menghadapi tantangan fundamental yang berisiko mewariskan keterbatasan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Masalahnya bukan hanya kekurangan guru atau fasilitas yang tidak memadai, melainkan sebuah sistem yang gagal memberikan harapan. Data menunjukkan bahwa ketersediaan sarana untuk SD dan SMA/SMK masih berada di bawah standar minimal. Hal ini menciptakan hambatan struktural yang menyulitkan anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Tingkat putus sekolah yang tinggi bukanlah cerminan dari kurangnya minat, melainkan respon logis terhadap kondisi ekonomi dan relevansi pendidikan yang ditawarkan. Tanpa akses yang merata dan kualitas yang terjamin, pendidikan gagal menjalankan fungsi esensialnya. Seperti yang diungkapkan oleh Paulo Freire dalam bukunya *"Pendidikan Kaum Tertindas"*, "Pendidikan sejati bukanlah sekadar transfer pengetahuan, melainkan praktik pembebasan." Di Nunukan, sistem pendidikan yang ada saat ini justru berisiko melanggengkan status quo, bukan membebaskan generasi muda dari jerat keterbatasan.

3.1.3. Kesehatan

Akses terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Nunukan juga masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh:

- Kurangnya tenaga medis: Jumlah dokter, perawat, dan bidan yang bertugas di Nunukan masih sangat kurang.
- Fasilitas kesehatan yang tidak memadai: Kondisi puskesmas dan rumah sakit yang ada di Nunukan masih belum memenuhi standar pelayanan kesehatan yang memadai.
- Jarak tempuh yang jauh: Masyarakat di wilayah pedalaman harus menempuh perjalanan yang jauh dan sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Sektor kesehatan menjadi cerminan paling gamblang dari tingkat kehadiran negara. Meskipun data kuantitatif menunjukkan jumlah puskesmas dan rumah sakit melebihi standar, fakta bahwa masyarakat Nunukan secara rutin berobat ke Tawau, Malaysia untuk penanganan serius adalah sebuah anomali yang tragis. Ini menandakan adanya krisis kepercayaan yang mendalam terhadap kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan domestik. Persebaran fasilitas yang tidak merata menjadikan layanan kesehatan hanya ilusi bagi mereka yang tinggal di wilayah pedalaman.

3.2. Penerapan Sila Ke-5 Pancasila dalam Program Pembangunan Pemerintah

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan melalui berbagai program pembangunan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-5. Beberapa program tersebut antara lain:

- Program Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, listrik, dan air bersih.
- Program Peningkatan Kualitas Pendidikan: Peningkatan kompetensi guru, rehabilitasi fasilitas sekolah, dan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi.
- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Pengiriman tenaga medis ke daerah terpencil, peningkatan fasilitas kesehatan, dan program jaminan kesehatan masyarakat.
- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Namun, implementasi program-program tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti:

- Kurangnya koordinasi antar sektor: Program pembangunan seringkali berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait.
- Anggaran yang terbatas: Alokasi anggaran untuk program pembangunan di Nunukan masih belum mencukupi.
- Kurangnya partisipasi masyarakat: Masyarakat lokal kurang dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
- Masalah birokrasi: Proses birokrasi yang rumit dan berbelit-belit menghambat pelaksanaan program pembangunan.

Menurut para ahli pembangunan, partisipasi bukan sekadar pelibatan, melainkan sebuah proses pemberdayaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Robert Chambers, seorang pakar pembangunan partisipatif, “Pembangunan yang sesungguhnya terjadi ketika masyarakat lokal memiliki kendali atas proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.” Kurangnya partisipasi di Nunukan menunjukkan bahwa pembangunan masih dilihat sebagai proyek pemerintah, bukan gerakan bersama.

3.3. Strategi dan Rekomendasi Mewujudkan Keadilan Sosial di Kabupaten Nunukan

Untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata di Nunukan, tidak cukup hanya dengan menambah anggaran atau program. Diperlukan sebuah pergeseran paradigma fundamental dari pembangunan yang berorientasi proyek menjadi pembangunan yang berorientasi pada manusia.

1. Memprioritaskan Infrastruktur Kehidupan, Bukan Sekadar Infrastruktur Fisik: Fokus harus digeser pada pembangunan infrastruktur yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup dan memutus rantai isolasi, yaitu jalan yang berkualitas, listrik yang andal, dan air bersih yang terjangkau.
2. Pendidikan dan Kesehatan sebagai Investasi Kedaulatan: Alokasi sumber daya untuk pendidikan dan kesehatan harus dilihat sebagai investasi pada ketahanan dan kedaulatan bangsa. Ini mencakup penempatan tenaga profesional terbaik dengan insentif yang layak dan jaminan fasilitas yang setara dengan wilayah lain di Indonesia.

3. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal: Program pemberdayaan ekonomi harus dirancang dari bawah, berdasarkan potensi riil dan kearifan lokal, bukan sekadar proyek seragam dari pusat.
4. Menjadikan Partisipasi sebagai Inti Pembangunan: Rekomendasi terpenting adalah melembagakan partisipasi otentik dalam setiap siklus pembangunan. Libatkan masyarakat, tokoh adat, dan organisasi lokal sejak tahap identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Inilah inti dari pembangunan yang berjiwa Pancasila.

Dengan menerapkan strategi dan rekomendasi tersebut, diharapkan keadilan sosial dapat terwujud secara merata di Kabupaten Nunukan, sehingga masyarakat dapat menikmati kesejahteraan yang setara dengan warga negara lainnya.

5. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi di Kabupaten Nunukan melalui lensa Sila ke-5 Pancasila, dapat ditarik beberapa kesimpulan fundamental sebagai berikut:

1. Terjadinya Paradoks Pembangunan yang Tajam: Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan ditandai oleh sebuah paradoks. Di satu sisi, pembangunan berhasil mencapai target kuantitatif pada infrastruktur tertentu seperti jalan dan pasar. Namun di sisi lain, terjadi kegagalan sistemik dalam menyediakan infrastruktur esensial yang menopang kualitas hidup, seperti akses universal terhadap listrik, air bersih, serta layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata. Kesenjangan ini bahkan memaksa warga untuk bergantung pada layanan dari negara tetangga, Malaysia, untuk kebutuhan krusial seperti kesehatan.
2. Implementasi Sila ke-5 yang Bersifat Prosedural, Bukan Substantif: Penerapan Sila ke-5 Pancasila dalam program pembangunan di Nunukan cenderung bersifat prosedural dan belum menyentuh substansi keadilan sosial. Model pembangunan yang dominan adalah bersifat *top-down* dan elitis, yang mengabaikan partisipasi otentik dari masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Bukti paling nyata dari kegagalan ini adalah anomali ekonomi di mana meningkatnya pendapatan perkapita tidak diiringi dengan penurunan angka kemiskinan, yang justru menunjukkan tren kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa manfaat pembangunan tidak terdistribusi secara adil dan merata.
3. Akar Masalah pada Paradigma Pembangunan: Kesenjangan yang terjadi bukanlah masalah teknis semata, melainkan bersumber dari paradigma pembangunan yang keliru. Pendekatan yang berorientasi pada proyek fisik telah gagal menjawab kebutuhan dasar manusia dan memberdayakan masyarakat. Akibatnya, alih-alih membebaskan masyarakat dari keterisolasian dan kemiskinan, model ini justru berisiko melanggengkan siklus keterbelakangan di wilayah perbatasan.

4.2 Saran

Bertolak dari kesimpulan di atas, diperlukan langkah-langkah strategis yang transformatif untuk mewujudkan keadilan sosial yang sejati di Kabupaten Nunukan. Berikut adalah saran yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan:

Untuk Pemerintah Pusat dan Daerah (Kabupaten Nunukan & Provinsi Kalimantan Utara):

1. Melakukan Pergeseran Paradigma Pembangunan: Mendesak pemerintah untuk secara fundamental mengubah pendekatan dari *top-down* menjadi pembangunan partisipatif yang berpusat pada manusia (*people-centered development*). Ini harus diwujudkan dengan melembagakan forum-forum musyawarah yang otentik dan memberikan kewenangan kepada masyarakat lokal untuk terlibat aktif dalam setiap siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi.
2. Memprioritaskan Pemenuhan Hak-Hak Dasar: Pemerintah harus segera merealokasikan fokus dan anggaran untuk menjamin akses universal terhadap layanan dasar. Prioritas utama adalah penyediaan listrik yang andal, air bersih yang layak, serta distribusi fasilitas dan tenaga profesional di bidang pendidikan dan kesehatan secara merata hingga ke wilayah-wilayah terpencil.
3. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Koordinasi: Menyederhanakan proses birokrasi yang menghambat implementasi program dan membangun mekanisme koordinasi yang solid antar-instansi (pusat, provinsi, dan kabupaten) agar program pembangunan berjalan sinergis, efektif, dan efisien.

Untuk Masyarakat Sipil dan Akademisi:

1. Mendorong Partisipasi Aktif dan Pengawasan Sosial: Organisasi masyarakat sipil (OMS) dan tokoh masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengadvokasi hak-hak warga dan menjadi mitra kritis pemerintah. Selain itu, perlu digalakkan fungsi pengawasan sosial terhadap jalannya program pembangunan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
2. Mengembangkan Kajian Lanjutan yang Berorientasi Solusi: Akademisi dan peneliti diharapkan dapat melakukan studi lebih lanjut untuk mengembangkan dan menguji model-model pembangunan partisipatif yang paling sesuai dengan konteks sosial-budaya di wilayah perbatasan. Penelitian ini harus berorientasi pada solusi praktis yang dapat diadopsi sebagai kebijakan.

Dengan sinergi dan komitmen dari semua pihak untuk menjalankan rekomendasi ini, harapan untuk mewujudkan amanat Sila ke-5 Pancasila di beranda depan bangsa bukan lagi menjadi utopia, melainkan sebuah kenyataan yang dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Mubarak M.M. (2021). Evaluasi ketersediaan infrastruktur pada kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia (kasus kabupaten nunukan). *Indonesian Journal of Spatial Planning*, (2), 45-53, <http://journals.usm.ac.id/index.php/ijsp>

Sudiar S. (2020). Kebijakan pembangunan perbatasan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahperbatasanpulauSebatik,Indonesia.JurnalParadigma,Vol.1No.3,
<https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/viewFile/316/279>